

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diperoleh kesimpulan penelitian sebagai berikut:

1. Berkaitan dengan peran/fungsi Dinas Sosial dalam pembinaan rawan sosial seperti diamanatkan dalam Pasal 48 ayat (2) Peraturan Walikota Bandung Nomor 475 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas Pokok Dan Fungsi Satuan Organisasi Pada Dinas Daerah Kota Bandung terhadap anak jalanan di Jalan Taman Sari Kelurahan Taman Sari Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung, ternyata pelaksanaan peran/fungsi tersebut dalam hal ini pembinaan dengan menertibkan anak jalanan yang berjualan telah dilaksanakan namun dirasa belum efektif, hal tersebut terlihat dari masih terdapat anak jalanan yang berjualan di daerah tersebut.
2. Dalam menjalankan upaya pembinaan terhadap anak jalanan sesuai dengan peran/fungsi Dinas Sosial dalam pembinaan rawan sosial, ternyata masih terdapat kendala. Kendala-kendala tersebut antara lain kurangnya kesadaran hukum dari masyarakat khususnya dari pihak keluarga dalam melarang anak-anak mereka menjadi anak jalanan yang berjualan di sekitar daerah Jalan Taman Sari Kelurahan Taman Sari Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung, kurangnya sosialisasi program-program pemerintah dalam memberikan sarana kesejahteraan untuk masyarakat yang kurang mampu, dan juga mentalitas

aparatus penegak hukumnya. Serangkaian kendala-kendala tersebut sangat berpengaruh dalam menjalankan upaya pembinaan anak-jalanan karena untuk mencapai hal tersebut dibutuhkan andil dari banyak pihak demi terwujudnya pelaksanaan tersebut.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian, maka dapat diajukan beberapa saran penelitian sebagai berikut:

1. Disarankan kepada Dinas Sosial Kota Bandung, untuk melakukan tindakan pembinaan dengan menertibkan anak jalanan dengan lebih efektif, seperti dengan melakukan pembinaan penertiban dengan lebih sering, dengan dilakukannya hal tersebut maka Dinas Sosial Kota Bandung akan dapat menertibkan anak jalanan dengan lebih efektif, dan dari sisi anak jalanan mereka akan lebih merasa takut untuk berjualan di jalan dikarenakan seringnya aparat dari dinas sosial yang melakukan penertiban di sekitar Jalan Taman Sari Kelurahan Taman Sari Kecamatan Taman Sari Kota Bandung.
2. Disarankan kepada Pemerintah Daerah Kota Bandung untuk lebih mensosialisasikan program-program pemerintah dalam rangka memberikan kesejahteraan rakyat, dan membantu rakyat kurang mampu, agar masyarakat kurang mampu tahu program tersebut sehingga mereka tidak memberdayakan anak-anak mereka dan menjadikan mereka anak jalanan dengan berjualan.
3. Disarankan kepada orang tua dari anak-anak jalanan yang berjualan tersebut agar lebih memperhatikan anak mereka dengan tidak membiarkan dan atau

menyuruh anak mereka menjadi anak jalanan dengan berjualan, karena pendidikan serta kehidupan yang lebih layak untuk mereka merupakan hal yang sangat penting bagi anak-anak di usia mereka karena hal tersebut berdampak terhadap masa depan dan mentalitas mereka.

4. Disarankan kepada Dinas Sosial Kota Bandung agar lebih menegakan dan menertibkan anak jalanan melalui upaya- upaya preventif secara hukum seperti melakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat, selain itu dengan cara dengan melakukan koordinasi dengan pihak-pihak lain.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Bagir Manan, Menegakkan Hukum Suatu Pencarian, Jakarta: Asosiasi Advokat Indonesia, 2009

Titik Triwulan Tutik, Pengantar Ilmu Hukum, PT. Prestasi Pustaka, Surabaya, 2006

L.J. van Apeldoorn, Oetarid Sadino , Pengantar Ilmu Hukum, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1985

C. Dewi Wulansari, Sosiologi Konsep dan Teori, PT. Refika Aditama, Bandung, 2009

Candra Gautama, Konvensi Hak Anak (Panduan Bagi Jurnalis), Lembaga Studi Pers dan Pembangunan, Jakarta, 2001

Hardius Usman dan Nachrowi Djalal Nachrowi, Pekerja Anak di Indonesia Kondisi, Determinan, dan Eksploitasi (Kajian Kuantitatif), PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2004

Paul Scholten: Algemeen Deen, hlm. 166 N.V. Uitgeversmaatschappij W.E.J Tjeenk Willink 1954, Kutipan diambil dari buku Sudikno Mertokusumo, Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat, Cetakan Pertama, Edisi Pertama, Liberty, Yogyakarta, 1981

Rika Saraswati, Hukum Perlindungan Anak di Indonesia, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015

Hessel Nogi S. Tangkilisan, Manajemen Publik, Jakarta : PT. Grasindo, 2005

Pusat Bahasa. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008

C. Djisman Samosir, Sekelumit Tentang Penologi & Pemasarakatan, Bandung: Nuansa Aulia, 2012

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta 1986

----- Sosiologi Suatu Pengantar, Rajawali Press, Jakarta, 2009

----- & Mustafa Abdullah, Sosiologi Hukum dalam Masyarakat, CV. Rajawali, Jakarta, 1982

----- Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum, CV. Rajawali, Jakarta, 1982

----- Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-masalah Sosial, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989

----- Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum, Alumni, 1981

----- Efektivikasi Hukum dan Peranan Sanksi, Penerbit Remadja Karya CV, Bandung, 1985

----- Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta:
UI Press.1983

Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Alumni, Bandung, 1982

----- Aneka Persoalan Hukum dan Masyarakat, Alumni, Bandung,
1997

Soedjono D., Penegakan Hukum Dalam Sistem Pertahanan Sipil, Bandung: PT.
Karya Nusantara, 1978

Dellyana, Shant., Konsep Penegakan Hukum. Yogyakarta: Liberty, 1988

E. Sumaryono, Etika Profesi Hukum : Norma-Norma Bagi Penegak Hukum,
Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1995

Mochtar Kusumaatmadja dan Arief Sidharta, Pengantar Ilmu Hukum, Suatu
Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum, P.T. Alumni,
Bandung, 2009

R. Abdoel Djamali, Pengantar Hukum Indonesia (Edisi Revisi), PT. Raja
Grafindo Persada, Jakarta, 1984

AW. Widjaja, Kesadaran Hukum Manusia dan Masyarakat Pancasila, CV. Era
Swasta, Jakarta, 1984

Badan Pembinaan Hukum Nasional, Simposium Kesadaran Hukum Masyarakat
Dalam Masa Transisi, Penerbit Binacipta

Seminar Hukum, Sumbangan Pendidikan Hukum Dalam Peningkatan Pelaksanaan Tugas Penegak Hukum Tanggal 25 s/d 27 September 1978 Di Yogyakarta, Yogyakarta: Seksi Hukum Pidana dan Kriminologi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 1978

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Peraturan Walikota Bandung Nomor 475 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas Pokok Dan Fungsi Satuan Organisasi Pada Dinas Daerah Kota Bandung

Sumber Lainnya:

Badan Pusat Statistik Data

<http://bandungkota.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/9>

Badan Pusat Statistik Data

<http://bandungkota.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/36>

Dinas Sosial Kota Bandung

<http://dinsos.bandung.go.id/Profile/program>

Pengertian Menurut Para Ahli, Pengertian Eksploitasi Anak Menurut Para Ahli

<http://www.pengertianmenurutparaahli.net/pengertian-eksploitasi-anak-menurut-para-ahli/>

Dinas Sosial Kota Bandung

<http://dinsos.bandung.go.id/SeksiFront/Seksi/Pembinaan%20Rawan%20Sosial%20Anak%20dan%20Remaja>

<http://www.pengertianmenurutparaahli.net/pengertian-eksploitasi-anak-menurut-para-ahli/>

Pusat Bahasa. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008